

ABSTRAK

Dimas Abimanyu Panji (2020081085)

ANALISIS SISTEM INFORMASI PADA KEPENDUDUKAN: STUDY KASUS INTEGRASI KTP DIGITAL DI KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN

Data dan dokumen kependudukan merupakan material yang sangat penting karena terdapat komponen yang sangat penting didalamnya yang berisi data-data dan informasi sensitive. Selama ini penduduk menggunakan dokumen konvensional yang berbentuk fisik yang rentan akan kerusakan hingga kehilangan. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, DUKCAPIL Bersama KEMENDAGRI membuat inovasi yang memudahkan masyarakat Indonesia. Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan solusi di era serba digital seperti saat ini. IKD memuat data kependudukan seperti KTP dan KK (Kartu Keluarga), dengan focus memudahkan pembawaannya dan meminimalisir pencetakan berulang sehingga dapat memangkas APBN dan dapat digunakan untuk keperluan negara lainnya yang lebih penting. Dengan adanya IKD, masyarakat Indonesia lebih praktis dalam menggunakan data kependudukannya, karena hanya dengan scan QR Code yang berada dalam IKD nya, instansi lain dapat Salinan data dari penduduk tersebut tanpa harus meminta fotocopy dokumen kependudukannya sebagai syarat dalam permohonan di instansi lain. Sehingga pengusungan digitalisasi, efisiensi dan paper-less adalah slogan yang tepat untuk aplikasi ini. Keunggulan lainnya adalah tidak perlu cetak KTP fisik lagi bilamana KTP hilang, rusak, pindah alamat ataupun perubahan element dalam data penduduk. Berdasarkan data per 1 Maret 2024 sudah sekitar 16,9% warga di kecamatan mampang prapatan terdaftar dan mengaktifasi IKD nya. Terlihat ternyata effort warga kecamatan tersebut cukup besar, karena baik kecamatan dalam satu provinsi hingga pada wilayah lain di seluruh Indonesia masih terbilang rendah. Walau memang kecamatan mampang prapatan masih dibawah kecamatan pancoran, tebet, pesanggrahan, jagakarsa dan pasar minggu, namun dalam skala nasional kecamatan mampang prapatan dapat diperhitungkan. Banyak benefit yang di tawarkan oleh IKD dan keunggulan lainnya adalah IKD akan terintegrasi dengan instansi pemerintahan lainnya seperti BPJS, NPWP, Sertifikat Vaksin, dan lain sebgainya. Sehingga hanya memerlukan 1 aplikasi dalam mengakses dokumen penduduk.

Kata kunci: Sistem Informasi, Integrasi KTP Digital, Dukcapil, Kemendagri